

PERAN KREDIT PERBANKAN PADA SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

**Desyani Panekenan
Grace A. J. Rumagit
Paulus A. Pangemanan**

ABSTRACT

The study aims to determine how the role of bank credit in 2011 through 2016 in the agricultural sector in the province of North Sulawesi. The study was conducted in November 2016 until January 2017. The data used is descriptive data of quantitative and qualitative data sources are primary data and secondary data obtained from the events on the ground or opinion of a subject field related to the provision of credit to the agricultural sector, and resources that are not directly provide data to investigators, obtained by way of written documentation regarding matters necessary or variable of Bank Indonesia Representative of North Sulawesi. Analysis of the data used is descriptive analysis method of data analysis of quantitative and qualitative concerning the description of bank credit to the agricultural sector in the province of North Sulawesi. Analysis of data taken, namely Bank Indonesia report the amount of credit to the agricultural sector of the Year 2011 to the 2016. These descriptive data analysis aims to find bank financing in the agricultural sector in the province of North Sulawesi, which will be presented in the form of tables and graphs as well as to see the development lending. The results showed that the role of bank credit to the agricultural sector in the province of North Sulawesi is increasing every tahunnya dari in 2011 through 2016 with an average growth 14.36%. With the increase in the agricultural sector credit each year, meaning that the banks increasingly trusted by the community to help strengthen the capital of agricultural business operators in this regard in the form of lending.

Keywords: *Credit, Bank, agricultural sector, North Sulawesi Province.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kredit perbankan tahun 2011 sampai 2016 pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2016 sampai Januari 2017. Data yang digunakan adalah data deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data adalah data primer dan data sekunder yang didapat dari kejadian-kejadian di lapangan atau pendapat subyek lapangan yang berhubungan dengan pemberian kredit pada sektor pertanian, dan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, diperoleh dengan cara dokumentasi tertulis mengenai hal-hal atau variable yang diperlukan dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu mengenai deskripsi kredit perbankan pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. Analisis data yang diambil yaitu laporan jumlah kredit Bank Indonesia untuk sektor pertanian dari Tahun 2011 sampai Tahun 2016. Analisis data deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan perbankan pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara yang akan disajikan dalam bentuk Tabel dan Grafik serta untuk melihat perkembangan penyaluran kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kredit perbankan pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2011 sampai 2016 dengan rata-rata perkembangan 14,36%. Terjadi peningkatan kredit sektor pertanian tiap tahunnya, artinya pihak perbankan semakin dipercaya oleh masyarakat untuk membantu memperkuat modal pelaku usaha pertanian dalam hal ini dalam bentuk pemberian kredit.

Kata kunci: Kredit, Perbankan, Sektor Pertanian, Provinsi Sulawesi Utara.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian masih memegang peranan penting bagi perekonomian nasional karena berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2013 terdapat 38 juta orang atau 15,07 persen dari total penduduk Indonesia, yang bekerja dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sebagai Negara agraris, perlu adanya perhatian pada sektor pertanian agar menjadi sektor yang kuat dan tangguh, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan perekonomian Indonesia. Sektor pertanian berperan sangat strategis dalam pembangunan, yaitu sebagai penyerap tenaga kerja, kontribusi terhadap produk domestik bruto, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong Bergeraknya sektor-sektor ekonomi rill lainnya. Walaupun demikian, sektor pertanian masih memiliki beberapa permasalahan, salah satunya adalah kurangnya permodalan petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak perbankan secara teori memiliki potensi besar sebagai pendukung pembiayaan pertanian karena secara legal formal merupakan lembaga intermediasi keuangan (Ashari, 2014).

Pemerintah bekerja sama dengan pihak perbankan telah meluncurkan beberapa kredit program/bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian melalui beberapa bentuk skim seperti dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, maupun yang mengarah komersil. Seiring dengan terbatasnya kemampuan finansial pemerintah dalam mendanai kredit pertanian, perlu dilakukan upaya optimalisasi kebijakan kredit program agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan pertanian. Untuk menutupi kekurangan modal, petani umumnya mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan di sekitar tempat tinggal mereka, baik formal maupun informal (Ashari, 2009). Kredit menjadi pilihan masyarakat sebagai jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat juga bagi sektor pertanian, alasannya karena pendapatan tidak mencukupi, sehingga tren penyaluran kredit cenderung naik khususnya pada lembaga keuangan bank. Seiring berkembangnya zaman kebutuhan masyarakat terus meningkat dan diperhadapkan dengan sumber pendapatan tidak mencukupi sehingga kredit menjadi salah satu

alternatif yang paling dinikmati masyarakat dalam kegiatannya memenuhi kebutuhan setiap hari (Irianto, 2012).

Penyaluran kredit diberikan kepada nasabah secara selektif, karena lembaga keuangan ini juga tidak dapat mengalami kerugian jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan. Sejumlah program pemerintah terkait dengan usaha memberdayakan ekonomi rakyat dan sektor pertanian telah dilaksanakan diberbagai daerah dengan tujuan yang sama, namun dengan sasaran yang berbeda. Keseluruhan kebijakan pembiayaan ini dimaksudkan untuk mempercepat gerakan ekonomi rakyat dan mendorong proses produksi pertanian (Ronga, 2015). Menurut Tampubolon (2002) kredit dianggap sebagai salah satu alat penting untuk memutuskan "lingkaran setan" dari pendapatan rendah, kemampuan membeli sarana produksi rendah, produktivitas usahatani rendah, pendapatan rendah. Namun dari pengalaman saat ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kredit di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terbukti dari masih lemahnya kemampuan petani dalam permodalan, walaupun beberapa kredit program sudah pernah diimplementasikan.

Pemberian program kredit dengan perantara pihak bank bertujuan untuk menambahkan modal para petani agar dapat memperluas usaha mereka. Namun yang terjadi para petani kurang mengetahui dengan adanya program tersebut karena kurangnya informasi (Rita, 2010). Menurut Indiasuti (2005) kontribusi kredit perbankan terhadap sektor pertanian masih sangat rendah meskipun bidang tersebut sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Tingginya persepsi resiko menjadi penyebab rendahnya kredit pada sektor pertanian. Kondisi minimnya pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian disebabkan oleh tiga hal yaitu: (1) pengalaman dan trauma beberapa bank menghadapi kredit bermasalah sewaktu mengucurkan kredit pertanian; (2) aturan BI yang cukup ketat agar bank prudent (kehati-hatian) dalam penyaluran dana, serta (3) banyak bank khususnya bank besar tidak memiliki pengalaman menyalurkan kredit. Pembiayaan usaha disektor pertanian yang ada saat ini, hampir semua berbasis perhitungan bunga (Ashari dan Saptana, 2005). Menurut Suhendra (2005) secara umum, kredit untuk sektor pertanian menetapkan tingkat suku bunga lebih rendah dibandingkan sektor non-pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk

memacu pertumbuhan sektor pertanian, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Namun, fakta menunjukkan serapan kredit untuk pertanian relatif lambat dibandingkan serapan sektor non-pertanian. Gejala tersebut salah satu penyebabnya adalah rendahnya rentabilitas penanaman modal di sektor pertanian. Kinerja perbankan di Sulawesi Utara terus menunjukkan perkembangan yang baik sebagaimana tercemin dari meningkatnya fungsi intermediasi perbankan serta terjaganya resiko kredit. Sebagai gambaran di Sulawesi Utara selama tahun 2013-2015, penyaluran pangsa kredit perbankan untuk sektor pertanian rata-rata 3,4%.

Secara umum kendala penyaluran kredit ke sektor pertanian adalah kurang *matching*-nya karakteristik usaha di sektor ini dengan *nature* usaha di perbankan. Usaha di sektor pertanian bersifat musiman (pendapatan petani juga musiman) sementara karakteristik usaha perbankan tidak terkait dengan musiman. Transaksi di perbankan dilakukan secara reguler, misalnya untuk pengembalian kredit dilakukan per bulan. Kondisi ini mengakibatkan sektor pertanian cenderung tidak dijadikan prioritas dalam penyaluran kredit oleh perbankan. Begitu dominannya pemberian kredit bank, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun usaha atau bisnis di dunia ini yang bebas dari kebutuhan kredit. Dengan kata lain kredit dapat membantu petani dalam memperoleh pinjaman modal (Teguh, 2009).

Rumusan Masalah

Sektor pertanian saat ini mengalami kendala pada pembiayaan, kurangnya biaya menjadi masalah utama petani di Sulawesi utara dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mengatasi kendala ini dibutuhkan adanya pembiayaan berupa penyaluran kredit dari pihak perbankan terhadap sektor pertanian. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran kredit perbankan pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi utara?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kredit perbankan Tahun 2011 sampai 2016 pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.

Manfaat

Penulisan ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam melatih cara berpikir serta menganalisis data dan bagi kalangan akademis diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai bidang perbankan khususnya penyaluran kredit disektor pertanian.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai Desember tahun 2016. Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah Penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer yang berupa kejadian – kejadian di lapangan atau pendapat subyek lapangan yang berhubungan dengan pemberian kredit pada sektor pertanian. Pengumpulan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, diperoleh dengan cara dokumentasi tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang diperlukan dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data hanya dilakukan pada Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara yang memiliki data kredit pembiayaan sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.

Konsep Pengukuran variabel

Konsep pengukuran variabel kredit perbankan terhadap sektor pertanian dilihat pada:

- I. Jenis-jenis kredit perbankan yaitu KKP-E, KPEN-RP, dan KUR (Kredit Usaha Rakyat). KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat).
- II. Kinerja perbankan pada sector pertanian di Provinsi Sulawesi Utara (Rp miliar/Tahun)
- III. Jumlah kredit perbankan pada sektor pertanian dan non pertanian di Provinsi Sulawesi Utara (Rp miliar/Tahun)
- IV. Jumlah NPL (*Non Performing Loan*) pada perbankan sewaktu pengembalian kredit.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu mengenai deskripsi kredit perbankan pada sektor pertanian di Sulawesi Utara. Analisis data yang diambil yaitu laporan jumlah kredit Bank Indonesia untuk sektor pertanian dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Analisis data deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan perbankan pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara yang akan disajikan dalam bentuk Tabel dan Grafik serta untuk melihat perkembangan penyaluran kredit

Deskripsi Umum Tempat Penelitian

Profil Bank Indonesia

Pada awalnya Bank Indonesia memiliki nama De Javasche Bank (DJB) berdasarkan Octrooi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 1 April 1860, yang sebelumnya hanya sebatas “Pulau Jawa” sesuai nama DJB. Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk mendukung Politik Guldenisasi dengan meluaskan jaringan DJB, maka terbuka peluang bagi DJB untuk melakukan ekspansi di luar wilayah Jawa. Kantor cabang DJB di Manado didirikan pada tanggal 9 September 1910, yang merupakan kantor cabang kedua untuk Sulawesi setelah kantor cabang DJB Makassar. Pada tanggal 15 Desember 1952 DJB dinasionalisasikan, maka DJB beserta seluruh kantor cabangnya beralih fungsi sebagai bank sentral. Berdirinya Bank Indonesia Manado dimulai sejak 1 Juli 1953 berdasarkan undang-undang bank sentral. Kantor Bank Indonesia Manado terletak di Jl. 17 Agustus no. 56, saat ini menjalankan perannya sebagai Economic Intelligent dan kepanjangan tangan kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta. Bank Indonesia Manado di dukung oleh 71 pegawai organik dan 30 pegawai non organik (PT. Bina Swadaya) yang tersebar 7 seksi, yaitu:

1. Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter
2. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter
3. Seksi Pengawasan Bank 1 dan 2
4. Seksi Akunting dan Kliring
5. Seksi Kas dan Pengedaran
6. Seksi Sumber Daya
7. Seksi Sekretariat, Komunikasi dan Pengamanan

Jumlah Perbankan di Provinsi Sulawesi Utara

Pada saat ini perkembangan jumlah bank dan jaringan kantor perbankan di provinsi Sulawesi Utara baik bank umum, bank syariah dan bank perkreditan rakyat (BPR) dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terlihat bahwa jumlah kantor perbankan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 aset perbankan Provinsi Sulawesi Utara baik bank umum konvensional, bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat (BPR) tumbuh positif lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara kelembagaan, perbankan Provinsi Sulawesi Utara pada laporan tahun 2011 terdiri dari 25 bank umum konvensional, tiga bank umum syariah, dan 17 bank perkreditan rakyat (BPR). Berdasarkan jaringan kantornya, bank umum konvensional memiliki 246 kantor dan bank umum syariah memiliki 13 kantor, sementara itu bank perkreditan rakyat (BPR) terdiri dari 48 kantor. Sepanjang tahun 2011 terdapat penambahan 21 kantor bank umum konvensional, lima kantor bank perkreditan rakyat (BPR) dan satu kantor bank umum syariah yang menggambarkan semakin besarnya aktivitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara.

Pada tahun 2012, perbankan Provinsi Sulawesi Utara pada laporan terdiri atas 25 bank umum konvensional, tiga bank umum syariah, dan 17 bank perkreditan rakyat (BPR). Berdasarkan jaringan kantornya, bank umum konvensional memiliki 255 kantor, bank umum syariah memiliki 13 kantor, sementara itu bank perkreditan rakyat (BPR) terdiri dari 49 kantor. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, penambahan jaringan kantor terus berlanjut. Pada triwulan III tahun 2012 terjadi penambahan tiga kantor bank umum konvensional di Kota Manado dan dua kantor bank umum konvensional di Kabupaten Minahasa. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi tidak hanya terjadi di Kota Manado sebagai pusat pertumbuhan, namun juga sudah mulai tersebar ke wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Pada tahun 2013 total bank di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebanyak 44 bank yang terdiri dari 23 bank umum konvensional, empat bank umum syariah dan 17 bank perkreditan rakyat (BPR). Sementara itu, berdasarkan jaringan kantornya total kantor bank tercatat 324 yang

terdiri dari 258 bank umum konvensional, 16 bank umum syariah, serta 50 kantor bank perkreditan rakyat (BPR). Jaringan kantor di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 menunjukkan adanya peningkatan dari 322 pada data triwulan II tahun 2013 menjadi 324 pada triwulan laporan. Adapun penambahan tersebut dikarenakan pembukaan tiga kantor bank konvensional di Kabupaten Talaud, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolaang Mongondow serta penutupan satu kantor bank perkreditan rakyat (BPR) di Kota Manado. Dengan semakin bertambahnya jumlah kantor cabang bank, mencerminkan aktivitas ekonomi khususnya sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara sudah semakin diperhitungkan oleh pihak perbankan.

Pada tahun 2014 total bank di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebanyak 46 bank yang terdiri dari 24 bank umum konvensional, empat bank umum syariah dan 18 bank perkreditan rakyat (BPR). Sementara itu, berdasarkan jaringan kantornya total kantor tercatat 363 yang terdiri dari 292 bank umum konvensional, 16 bank umum syariah, dan 55 kantor bank perkreditan rakyat (BPR). Jaringan kantor di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Penambahan tersebut karena dibukanya 20 kantor bank umum konvensional, dan penambahan satu bank perkreditan rakyat (BPR) dengan empat kantor bank perkreditan rakyat (BPR). Pada Tahun 2015 terjadi pengurangan tiga kantor bank umum konvensional, sehingga totalnya menjadi 289 kantor bank umum konvensional. Tahun terakhir 2016 menunjukkan adanya peningkatan pada total bank di Provinsi Sulawesi Utara dari 24 menjadi 29. Adapun penambahan bank tersebut dikarenakan pembukaan lima kantor bank umum konvensional yang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara, sehingga total bank menjadi 29 dengan 287 jaringan kantor sedangkan bank perkreditan rakyat (BPR) masih sama dengan periode sebelumnya yaitu sebanyak 18 dengan 55 jaringan kantor.

Jenis Kredit Perbankan Khusus Sektor Pertanian KKP-E, KPEN-RP, dan KUR-Mikro.

Dalam bidang pertanian, perbankan memiliki jenis-jenis kredit khusus pembiayaan

di sektor pertanian, sebagai salah satu produk untuk nasabanya. Jenis kredit program yang dikeluarkan oleh pemerintah di Sulawesi Utara adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai skim kredit atau pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah yang dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan. Jenis kredit program UMKM terbagi atas kredit ketahanan pangan dan energi (KKP-E), kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP), dan kredit usaha rakyat (KUR). KKP-E dan KPEN-RP merupakan kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, pengembangan tanaman bahan baku nabati dan revitalisasi pertanian yang diberikan melalui kelompok tani untuk pembiayaan terhadap sektor pertanian. Sedangkan KUR-Mikro secara umum disalurkan khusus kepada UMKM dan koperasi.

KKP-E yaitu kredit yang disalurkan dengan plafon untuk petani, pekebun, nelayan dan pembudidaya ikan paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,00 per debitur. Untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung dan kedelai) paling tinggi sebesar Rp.500.000.000,00 per debitur. Sedangkan untuk kelompok tani dalam rangka pengadaan atau peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain paling tinggi sebesar Rp.500.000.000,00 per debitur. Jangka waktu kredit maksimal 5 tahun dengan suku bunga petani atau peternak khusus komoditi tebu 7% p.a sedangkan komoditi lain 6% yang ditinjau setiap 6 bulan. Suku bunga kredit untuk komoditi tebu maksimal sebesar suku bunga penjamin Bank (LPS) + 5% dan komoditi lain maksimal sebesar suku bunga penjamin Bank (LPS) + 6%. Bank yang melaksanakan kredit program KKP-E antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Artha Graha, Bank SulutGo, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Syariah. Permasalahan yang ditemukan dalam kredit ini adalah bank mengalami kesulitan dalam memilih debitur yang layak, debitur tidak dapat menyediakan agunan, adanya batasan bahwa KKPE hanya disalurkan melalui kelompok tani dan atau koperasi, dan KKPE tidak dapat

digunakan untuk membiayai peralatan atau mesin.

KPEN-RP yaitu kredit yang disalurkan dengan plafon kredit ditetapkan oleh direktur jenderal perkebunan. Jangka waktu kredit maksimal 15 tahun dengan suku bunga kredit maksimal sebesar suku bunga penjaminan bank (LPS) +5%. Suku bunga petani atau peternak untuk komoditi kelapa sawit dan kakao 7% p.a sedangkan untuk komoditi karet 6% p.a, ditinjau setiap enam bulan atas dasar kesepakatan pemerintah dan bank pelaksana. Bank yang melaksanakan kredit program KPEN-RP antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank Artha Graha, Bank Mega, Bank SulutGo, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Syariah. Permasalahan pada kredit ini adalah permasalahan yang terkait dengan lahan, antara lain mengenai rencana tata ruang dan wilayah, kenaikan biaya sertifikat lahan, lambatnya proses sertifikasi lahan, lahan areal proyek yang dikuasai pihak lain. Petani peserta dan koperasi juga belum ada dan belum memiliki kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dalam hal pembagian luas lahan, pembagunan kebun, pemeliharaan dan pengelolaan kebun. Para bank pelaksana belum dapat menyalurkan KPEN-RP yang belum memenuhi kelengkapan administrasi seperti penetapan peserta oleh bupati, rekomendasi calon perusahaan mitra dari bupati atau gubernur, perjanjian kerja sama petani, dan kurangnya koordinasi dinas terkait dengan bank pelaksana.

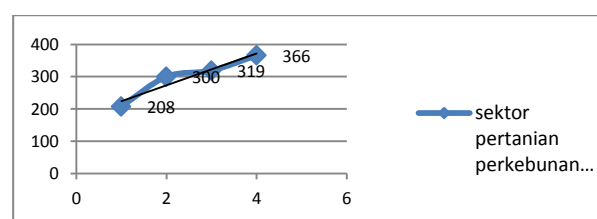
KUR yaitu kredit yang disalurkan dengan plafon maksimal Rp.500.000.000,00 per debitur. Jangka waktu kredit maksimal 6 tahun dengan suku bunga kredit 22% p.a. Kredit ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai semua usaha produktif yang feasible tapi belum bankable. Bank yang melaksanakan kredit program KUR-Mikro antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank SulutGo, Bank Mandiri Syariah.

Untuk menyalurkan kredit ini bank harus memiliki pedoman khusus dalam penyaluran dana ke sektor pertanian karena banyak ditemukan kendala dalam penyaluran dana. Kendala dalam penyaluran dana ke sektor pertanian adalah

sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang, suku bunga masih dirasakan cukup tinggi dan dan kurang cocoknya usaha disektor pertanian dengan usaha yang ada disektor perbankan.

Kinerja Perbankan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara

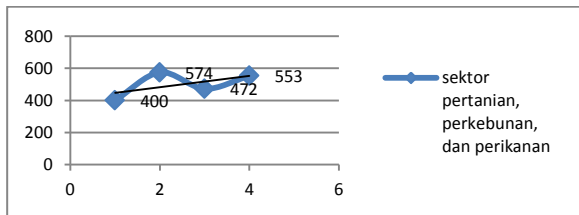
Perbankan yang secara teori memiliki tugas untuk menghimpun dana masyarakat dengan jumlah yang sangat besar, ternyata sudah maksimal dalam membiayai sektor pertanian. Hal ini dapat diketahui dari proporsi kredit perbankan untuk sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara yang terus meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Jumlah Kredit Sektor Pertanian Tahun 2011 (Triwulan I-IV)

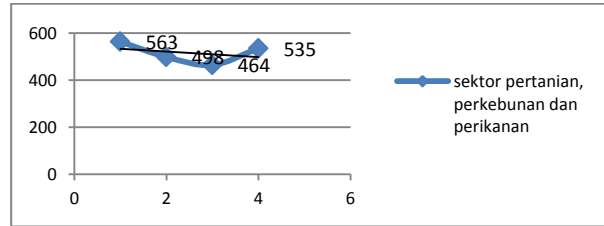
Gambar 1 menunjukkan bahwa peran perbankan untuk membiayai sektor pertanian masih relative terbatas. Pada triwulan I, jumlah kredit yang disalurkan pada sector pertanian hanya mencapai Rp. 208.440.000.000 atau hanya 1,61% dari total kredit yang disalurkan. Namun demikian, dukungan perbankan terhadap sector pertanian mulai menunjukkan perkembangan dari pertumbuhan kredit yang mencapai 48,67% yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada triwulan II jumlah kredit yang disalurkan pada sector pertanian mencapai Rp.300.000.000.000 atau hanya 2,15% dari total kredit yang disalurkan dan tumbuh 121,88%. Pada triwulan III peran perbankan dalam membiayai sektor pertanian semakin menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah kredit yang disalurkan pada sektor pertanian mencapai Rp. 319.000.000.000 atau tumbuh 94,75% atau hanya 2,18% dari total kredit yang disalurkan. Pada triwulan IV akhir tahun 2011 peran kredit perbankan pada sektor pertanian menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah kredit yang disalurkan pada sektor pertanian mencapai Rp. 366.000.000.000 atau tumbuh 76,60% atau hanya 2,30% dari total kredit yang disalurkan. Tingginya jumlah kredit pada tahun 2011 triwulan IV dikarenakan oleh jumlah konsumsi yang meningkat yang didukung oleh

faktor musiman perayaan hari-hari raya dan persiapan pergantian tahun. Disamping itu, pertumbuhan konsumsi tidak lepas dari daya beli petani seiring dengan meningkatnya harga komoditas, yang dapat dilihat dari nilai tukar petani (NTP) mencapai 104,19 atau tumbuh 3,27%. Peningkatan terutama terjadi pada sub-sektor perkebunan rakyat dan pangan. Dalam indeks NTP dari data BPS ada sekitar 35% masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara bermata pencaharian sebagai petani, sehingga total kredit yang disalurkan pada triwulan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.



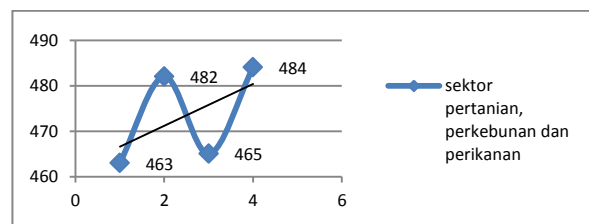
Gambar 2. Jumlah Kredit Sektor Pertanian Tahun 2012 (Triwulan I-IV)

Dari Gambar 2 dapat kita lihat peran kredit perbankan dalam membiayai sector pertanian pada triwulan I mencapai Rp. 400.000.000 atau 2,47% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh 89,82%. Pada triwulan II mengalami kenaikan dari triwulan I menjadi Rp. 574.000.000.000 atau 3,28% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh 90,01%. Pada triwulan III mengalami penurunan dari triwulan II menjadi Rp. 472.000.000.000 atau 2,56% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh 46,29%. Pada triwulan terakhir tahun 2012 yaitu triwulan IV terjadi kenaikan dari triwulan sebelumnya menjadi Rp. 553.000.000.000 atau 2,80% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh 51,01%. Tingginya total kredit pada triwulan II karena mengawali musim panen di awal tahun 2012, dari sekitar 3.800 hektar sawah yang ada di wilayah Kotamobagu, sekitar 25 hektar padi sawah telah dipanen. peningkatan kinerja sector pertanian secara lain juga dapat dikonfirmasi dengan data dari perkembangan luas panen yang tercatat sebesar 35.11 ribu hektar dengan produksi beras yang dihasilkan menjadi 108.52 ribu ton atau naik 46,65%. Selain produksi beras, produksi pipilan jagung kering mengalami peningkatan menjadi 126, 21 ribu ton.



Gambar 3. Jumlah Pembiayaan Sektor Pertanian Tahun 2013 (Triwulan I-IV)

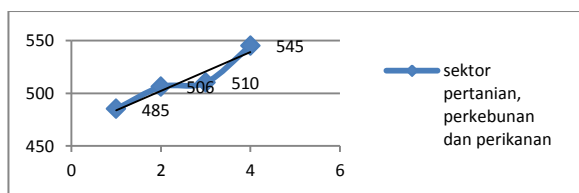
Dari Gambar 3 dapat kita lihat peran kredit perbankan dalam membiayai sector pertanian pada triwulan I mencapai Rp. 563.000.000.000 atau 2,84% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh 40,86%. Pada triwulan II mengalami penurunan dari triwulan I menjadi Rp. 498.000.000.000 atau 2,34% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh -13,23%. Pada triwulan III kembali mengalami penurunan dari triwulan II menjadi Rp. 464.000.000.000 atau 2,09% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh -1,61%. Pada triwulan terakhir tahun 2013 yaitu triwulan IV terjadi kenaikan dari triwulan sebelumnya menjadi Rp. 535.000.000.000 atau 2,35% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh -3,28%. Tingginya total kredit pada triwulan I disebabkan tertahannya laju pertumbuhan sector pertanian karena adanya gangguan cuaca berupa tingginya curah hujan disertai angin kencang di awal tahun yang mengganggu produktivitas sub sector tanaman pangan dan hortikultura maupun produktivitas sub sector perikanan tangkap.



Gambar 4. Jumlah Pembiayaan Sektor Pertanian Tahun 2014 (Triwulan I-IV)

Dari Gambar 4 dapat kita lihat peran kredit perbankan dalam membiayai sector pertanian pada triwulan I mencapai Rp. 463.000.000.000 atau 2,01% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh -18,07%. Pada triwulan II mengalami kenaikan dari triwulan I menjadi Rp. 482.000.000.000 atau 2,00% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh -5,54%. Pada triwulan III kembali mengalami penurunan dari

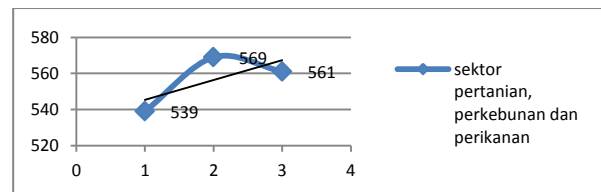
triwulan II menjadi Rp. 465.000.000.000 atau 1,90% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh -6%. Pada triwulan terakhir tahun 2014 yaitu triwulan IV terjadi kenaikan dari triwulan sebelumnya menjadi Rp. 484.000.000.000 atau 1,89% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh -9,51%. Membaiknya sector pertanian pada triwulan II jika dibandingkan triwulan I disebabkan oleh membaiknya kinerja sector pertanian tanaman bahan makanan (padi) dan perikanan seiring dengan membaiknya kondisi cuaca jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun. Itu sebabnya kredit pada triwulan II lebih tinggi dibandingkan di triwulan lainnya.



Gambar 5. Jumlah Pembiayaan Sektor Pertanian Tahun 2015 (Triwulan I-IV)

Dari Gambar 5 dapat kita lihat peran kredit perbankan dalam sector pertanian pada triwulan I mencapai Rp. 485.000.000.000 atau 1,89% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh -3,22%. Pada triwulan II mengalami kenaikan dari triwulan I menjadi Rp. 506.000.000.000 atau 1,85% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh -2,15%. Pada triwulan III kembali mengalami kenaikan dari triwulan II menjadi Rp. 510.000.000.000 atau 1,76% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh 0,19%. Pada triwulan terakhir tahun 2015 yaitu triwulan IV terjadi kenaikan dari triwulan sebelumnya menjadi Rp. 545.000.000.000 atau 1,80% dari total kredit yang disalurkan yang tumbuh 7,93%. Pada triwulan IV sector pertanian mengalami perlambatan, disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan beberapa subsector utamanya seperti subsector perkebunan tahunan serta subsector pertanian tanaman pangan dan subsector perikanan. Faktor cuaca yang kurang mendukung akibat fenomena El Nino dan usia tanaman yang sudah tidak produktif menjadi alasan utama penurunan. Sehingga banyak petani yang mengambil kredit pada triwulan IV. Membaiknya kondisi iklim tahun 2016 mendorong peningkatan luas tanam dan jumlah produksi pertanian serta produksi perkebunan tanaman. Di samping perbaikan cuaca,

peningkatan kinerja pertanian di dorong juga oleh program pemerintah daerah berupa percetakan sawah, bantuan alat mesin pertanian, bantuan bibit atau benih, subsidi pupuk dan penyuluhan petani. Dua faktor utama tersebut mendorong produksi beras sehingga mencapai 95.583 ton. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, total percetakan sawah yang dilakukan pemerintah selama tahun 2016 yaitu sebesar 2.855 ha.



Gambar 6. Jumlah Pembiayaan Sektor Pertanian Tahun 2016 (Triwulan I-III)

Dari Gambar 6 dapat kita lihat peran kredit perbankan dalam membiayai sector pertanian pada triwulan I mencapai Rp. 539.000.000.000 atau 1,81% dari total kredit yang disalurkan. Pada triwulan II mengalami kenaikan dari triwulan I menjadi Rp. 569.000.000.000 atau 1,85% dari total kredit yang disalurkan. Pada triwulan III bulan november kembali mengalami kenaikan dari triwulan II menjadi Rp. 561.000.000.000 atau 1,82% dari total kredit yang disalurkan.

Perkembangan Kredit Perbankan Pada Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Perbankan di Provinsi Sulawesi Utara memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian. Perbankan yang mampu mengembangkan bisnis dibidang kredit ini, mampu mendukung program nasional yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dapat dikatakan bahwa keberadaan program perkreditan merupakan salah satu unsur pelancar bagi keberhasilan dalam program pembangunan dan khususnya bagi sector pertanian. Kredit untuk sector pertanian menetapkan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan non pertanian, hal ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan sector pertanian. Perkembangan pembiayaan perbankan di provinsi Sulawesi Utara pada sector pertanian dan non pertanian dapat disajikan dalam bentuk tabel 2, dengan total pembiayaan dari tahun 2011-2016.

Dari data di atas, dapat diketahui perkembangan perbankan terhadap sector pertanian dan non-pertanian di Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami peningkatan untuk sector pertanian, dan peningkatan serta penurunan untuk non-pertanian. Pada tahun 2011 perkembangan pembiayaan perbankan pada sector pertanian di Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 368.247.000.000 dan pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 555.364.000.000 atau meningkat 50,8%. Pada tahun 2013 total pembiayaan perbankan menurut dibandingkan dengan tahun 2012 menjadi Rp. 534.820.000.000. Pada tahun 2014 kembali terjadi penurunan dari tahun 2013 yaitu menjadi Rp. 483.938.000.000, kemudian pada tahun 2015 terjadi kenaikan menjadi Rp. 538.867.000.000 atau meningkat 11,3%. Pada tahun terakhir 2016 kembali terjadi kenaikan dari tahun 2015 yaitu menjadi Rp. 596.161.000.000 atau meningkat 10,6%. Perkembangan pembiayaan perbankan terhadap non pertanian di Provinsi Sulawesi Utara berupa kredit khusus non-pertanian di tahun 2011 sebesar Rp.2.421.212.000.000 dan pada

tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 2.834.259.000.000 atau meningkat 17%. Pada tahun 2013 kembali terjadi kenaikan dari tahun 2012 yaitu menjadi Rp. 9.778.709.000.000. Pada tahun 2014 terjadi penurunan dari tahun 2013 menjadi Rp. 3.622.776.000.000 dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi Rp. 3.458.132.000.000. Sampai pada tahun 2016 perkembangan pembiayaan perbankan di Provinsi Sulawesi Utara kembali menurun menjadi Rp. 2.611.457.000.000.

Kredit Bermasalah dan Cara Mengatasi

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Misalnya seperti berikut:

1. Persyaratan pembayaran bunga
2. Pengambilan pokok pinjaman bunga
3. Peningkatan margin deposit
4. Pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah dan Kantor Bank-Bank Umum, Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2011-2016

Kelompok Bank	Posisi					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum						
Jumlah bank	25	23	24	24	24	29
Jumlah kantor	248	266	272	292	289	286
Bank Syariah						
Jumlah bank	3	3	4	4	4	4
Jumlah kantor	13	13	16	16	14	12
Bank Perkreditan Rakyat						
Jumlah bank	17	17	17	18	18	18
Jumlah kantor	48	50	51	55	55	55

Sumber: Bank Indonesia Manado (2016) diolah

Tabel 2. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Untuk Sektor Pertanian dan Non-Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara

Tahun	Perkembangan Pembiayaan (Jutaan Rp)				Total
	Sektor Pertanian	%	Non-Pertanian	%	
2011	368.247	0,022	2.421.212	0,148	2.789.459
2012	555.364	0,027	2.834.259	0,142	3.389.623
2013	534.820	0,022	9.778.709	0,418	10.313.529
2014	483.938	0,018	3.622.776	0,139	4.106.714
2015	538.867	0,018	3.458.132	0,116	3.996.999
2016	596.161	0,019	2.611.457	0,083	3.207.618

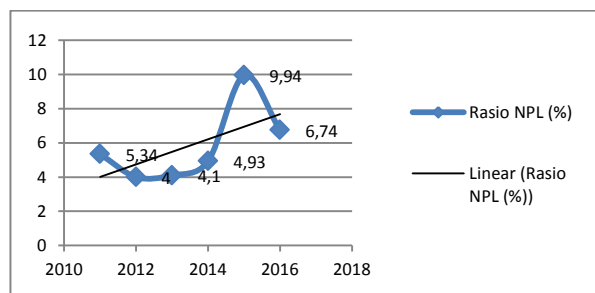
Sumber: Bank Indonesia (BI), 2016, diolah

Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (utang tidak bias ditagih), dan solvabilitas (modal berkurang). Sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank akan kehilangan sumber pendapatan di sampingnya harus menyisihkan cadangan yang sesuai dengan kolektibilitas kredit. NPL adalah rasio membandingkan antara total kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan dalam bentuk presentase.

Tabel 3. Jumlah *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan Provinsi Sulawesi Utara.

Tahun	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Jutaan Rp)	Rasio NPL (%)
2011	19.658	5,34
2012	22.187	4,00
2013	21.933	4,10
2014	23.839	4,93
2015	53.583	9,94
2016	40.185	6,74
Total	181.385	35.05

Sumber: Data Bank Indonesia (BI) 2016, diolah.



Gambar 7. Jumlah *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan Provinsi Sulawesi Utara

Pada Tabel 3 dapat dilihat jumlah NPL yang terjadi pada perbankan di Provinsi Sulawesi Utara. Dari tabel 3 pada tahun 2011 total NPL sebesar Rp. 19.658.000.000 dengan rasio NPL 5,34%, sedangkan pada tahun 2012 terjadi peningkatan total NPL menjadi Rp. 22.187.000.000 dengan rasio NPL 4,00%. Kemudian pada tahun 2013 terjadi penurunan total NPL menjadi Rp. 21.93.000.000 dengan rasio NPL 4,10%. Pada tahun 2014 kembali

terjadi kenaikan total NPL menjadi Rp. 23.839.000.000 dengan rasio NPL 4,93%. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2014 sehingga menjadi Rp. 53.583.000.000 dengan rasio NPL 9,94% dan terakhir tahun 2016 total NPL menurut menjadi Rp. 40.185.000.000 dengan rasio NPL 6,74%. NPL pada perbankan di Provinsi Sulawesi Utara ditemukan pada saat pengembalian kredit, dimana terdapat kredit bermasalah atau kredit macet yang penyebabnya karena banyaknya nasabah yang tidak mampu lagi membayar pinjamannya atau tidak melunasi utangnya. Tingginya NPL pada tahun 2015 dikarenakan banyak terjadinya gagal akibat El Nino, sehingga banyak kredit yang tidak terselesaikan.

Berikut kelompok kolektabilitas yang merupakan kredit bermasalah atau NPL (*Non Performing Loan*) yaitu:

I. Kredit kurang lancar (Substandart) dengan kriteria:

- terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui batas 90 hari;
- sering terjadi cerukan
- frekuensi mutasi rekening relative rendah
- terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- dokumentasi pinjaman yang lemah

II. Kredit diragukan (doubtful) dengan kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui batas 180 hari
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- Terjadi wanprestasi lebih dari waktu 180 hari
- Terjadi kapitalisasi bunga

III. Kredit macet (loss) dengan kriteria:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui batas 270 hari
- Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- Dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Untuk menyelesaikan masalah kredit macet ini, perbankan mengupayakan penyelesaian damai dengan opsi-opsi pelunasan dengan angsuran, penjualan agunan secara sukarela, pelunasan dengan keringanan bunga dan pinalti serta penyelesaian dengan masuknya investor baru. Pencegah kredit bermasalah dengan prinsip kehati-hatian, meliputi permohonan, analisis, keputusan, perjanjian, pengikat jaminan, dropping kredit, pengawasan, pelunasan dan atau perpanjangan. Penangan kredit bermasalah yaitu penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi perkreditan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbankan di Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi yang besar dalam pembiayaan di sektor pertanian. Pembiayaan perbankan di Provinsi Sulawesi Utara untuk sector pertanian terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2011 sampai 2016 dengan rata-rata perkembangan 14,36%. Dengan adanya peningkatan kredit sektor pertanian tiap tahunnya, artinya pihak perbankan semakin dipercaya oleh masyarakat untuk membantu memperkuat modal pelaku usaha pertanian dalam hal ini dalam bentuk pemberian kredit.

Saran

Pihak perbankan di Provinsi Sulawesi Utara kiranya dapat mempertahankan dan meningkatkan pembiayaan pada sektor pertanian agar bias memacu pertumbuhan sektor pertanian. Perbankan di Provinsi Sulawesi Utara lebih banyak mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembiayaan sektor pertanian dan perkembangan pada perbankan terlebih pada kantor-kantor perbankan yang ada di pelosok-pelosok daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2009. Optimalisasi Kebijakan Kredit Progam Sektor Pertanian diIndonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.Bogor.
- . 2014. Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian diIndonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Ashari dan Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Forum Penelitian Agroekonomi. Vol 23,2 Desember 2005 : 132-147.
- Anonymous, 2014. Analisis Triwulan: Perkembangan Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran, Triwulan I-2014. BEMP.
- Aviliani. 2009. Kebijakan Perbankan dalam Sektor Agribisnis. FEM-IPB. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2006. Laporan Perekonomian Indonesia 2006. Bank Indonesia, Jakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. Manajemen Perbankan. Penerbit-Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hasibuan, Melayu S. 2011. Dasar-Dasar Perbankan. Penerbit-PT Bumi Aksara. Jakarta.
- . 2008. Dasar-Dasar Perbankan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Irianto, S G. 2012. Pedoman Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) SektorPertanian. Direktorat Pembiayaan Pertanian. Kementrian Pertanian.Jakarta.

- Kasmir. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta. PT. Raja GrafindoPersada.
- Kasmir. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Penerbit-PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2016. Dasar-dasar Perbankan. Penerbit-PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khalitsar, Salman R. 2003. Akuntansi Biaya Pendekatan Product Costing. Penerbit-INDEKS. Jakarta.
- Kholmi, Masiyah. 2004. Akuntansi Biaya. Penerbit-UMM Press. Malang.
- Kotler, Philip. 2000. Manajemen ahli Bahasa Benyamin Molan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Booklet Perbankan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Edisi 1 Maret 2014.
- Parera, J, D. 2004. Bank Indonesia. Bank Sentral Republik Indonesia. Penerbit-Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. Jakarta.
- Ratnawati, A. 2009. Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis. FEM-IPB. Jakarta.
- Rita, H. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3S. Jakarta.
- Ronga, Omega B. 2015. Pembiayaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Cabang Tondano terhadap Sektor Pertanian di Kabupaten Minahasa. Skripsi Fakultas Pertanian Unsrat. Manado.
- Supriyono. 2000. Akuntansi Biaya. Penerbit-BPFE. Yogyakarta
- _____, Maryanto. 2011. Buku Pintar Perbankan. Penerbit-CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Suhendra, E Sussy, 2005. Peran Sektor Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Pendekatan input-Output. Universitas Gunadarma.
- Syukur, M. 2009. Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian. Kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Agribisnis. Jakarta.
- Tampubolon, S. H. M. 2002. Kredit Untuk Pertanian. Pusat Studi Pembangunan IPB dan USESE Fondation.
- Taswan. 2010. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Teguh. P. M. 2009. Manajemen Kredit. Yogyakarta.
- Totok, B dan Sigit, T. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Syukur, M Sugiarto, Hardianto dan Budi Wiryono. 2003. Analisis Rekrayasa Kelembagaan Pembiayaan Usaha Tani Pertanian. Bogor.
- Widilestariningtyas, Ony. 2012. Akuntansi Biaya. Penerbit-Graha Ilmu. Yogyakarta.